



**PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR**

Sumitro

Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

*Dikirim : 22 September 2020
Revisi pertama : 08 Oktober 2020
Diterima : 15 Oktober 2020
Tersedia online : 28 Oktober 2020*

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

Email : metrobaya@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur tahun 2018 berdasarkan Rasio Keuangan serta menganalisis apakah terdapat perbedaan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data rasio keuangan serta uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pemerintah Kota mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan Pemerintah Kabupaten berdasarkan rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efisiensi, rasio Aktivitas Belanja Rutin, rasio Aktivitas Belanja Pembangunan, rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dan rasio Pertumbuhan Pendapatan. Sementara itu Pemerintah Kabupaten mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan Pemerintah Kota berdasarkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pertumbuhan Belanja Rutin dan rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin. Berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas Belanja Rutin, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan terakhir dengan dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikenal sebagai otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menjalankan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. APBD merupakan kebijakan yang utama bagi Pemerintah daerah. APBD sebagai salah satu instrumen dalam keuangan daerah, memiliki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efektivitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah, dan dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

Setelah empat tahun terakhir, ketimpangan cenderung stagnan. Hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini terjadi kesenjangan antar wilayah, baik antar wilayah kabupaten/kota maupun antar wilayah desa. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan fiskal. Disamping itu kesenjangan antar wilayah juga dapat menciptakan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu rganisasi pemerintahan yang baik diharapkan mampu melindungi dan melayani kebutuhan masyarakat. Pada pemerintahan yang baik, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem *check and balances*. Indikator kesuksesan pada organisasi pemerintahan tidak diukur dari saldo laba, tetapi dilihat dari mutu pelayanan dan efisiensi dari penggunaan dana yang tersedia.

Hal ini menyebabkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut maka dibutuhkan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan

otonomi daerah, sehingga penilaian kinerja APBD sangat penting dalam kerangka menuju penguatan otonomi daerah.

Halim dan Kusufi dalam Sulistyono (2018) menyatakan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 47.995 km², dan merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota, yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten dan kota memiliki kedudukan yang sama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja didefinisikan secara beragam. Hubbard dalam Sobirin (2016) menyatakan bahwa kinerja merupakan konstruk *multifaceted*, dimana masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap kinerja cenderung mendefinisikan kinerja sesuai dengan pemahaman dan kepentingannya. Lebih lanjut, Lebas dan Euske dalam Sobirin (2016) mendefinisikan kinerja sebagai berikut : *“Performance is the sum of all processes that will lead managers to taking appropriate actions in the present that will create a performing organization in the future (i.e., one that is effective and efficient)”*. Artinya kinerja adalah sekumpulan proses yang mendorong seorang manajer untuk mengambil tindakan yang tepat pada hari ini sehingga mampu menghasilkan performansi organisasi di masa yang akan datang (yakni efektivitas dan efisiensi organisasi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja didefinisikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan.

Indikator kinerja yang bisa digunakan oleh sebuah organisasi cukup beragam. Terlepas dari banyaknya indikator kinerja tersebut, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa setiap indikator tidak berdiri sendiri atau terpisah dari indikator lain. Sebaliknya setiap indikator adalah bagian yang tidak terpisahkan dari indikator lain

yang saling terkait sehingga pada akhirnya yang tersisa adalah indikator-indikator kunci yang jumlahnya sangat terbatas.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan organisasi tersebut (Sutrisno, 2016). Kinerja keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan organisasi yang umumnya menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi organisasi yang tercermin pada laporan keuangan. Fahmi (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Munawir (2016) menyatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk: a. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan pendek. b. Mengetahu tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajibannya, yang mencakup baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka Panjang. c. Mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan laba. d. Mengetahui stabilitas, yaitu kemampuan organisasi untuk melakukan usahanya dengan stabil.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Ikatan akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa kinerja perusahaan atau organisasi dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Fahmi (2017) menyatakan bahwa secara umum terdapat lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu organisasi, yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan

Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan Perhitungan

Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh

Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- a. *Times series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan nantinya akan terlihat secara grafik.

- b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara organisasi dan organisasi lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang menyatakan posisi organisasi
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan organisasi setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh organisasi.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Laporan Keuangan

Fahmi (2017) menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau organisasi, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Lebih lanjut, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan atau organisasi dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

Rasio Keuangan

Fahmi (2017) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan atau organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan *trend* pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik

Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Halim (2016) menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan tersebut bahwa terdapat tiga pilar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas. Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi untuk pengambilan kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Data berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (realisasi APBD) pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020.

Populasi dan Sampel

Jumlah Populasi dalam penelitian ini sebanyak 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 38 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mendokumentasikan catatan tertulis tentang data APBD dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Untuk menghitung rasio pertumbuhan juga digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (realisasi APBD) pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Kemandirian, kinerja Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten, yang ditunjukkan oleh rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Kota sebesar 23,61%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten sebesar 14,32%. Hal ini berarti bahwa pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemandirian yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Timur. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dkk (2019) serta Kusmila dkk (2018) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan secara signifikan pada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk kemandirian.
2. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, kinerja Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kota, yang ditunjukkan oleh rata-rata rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten sebesar 109,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota sebesar 109,21%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Kota. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Timur. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusmila dkk (2018) serta Magdalena dan Kurniawan (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan secara signifikan pada pemerintah daerah dalam bentuk Efektivitas.
3. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Efisiensi, kinerja Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten, yang ditunjukkan oleh rata-rata rasio Efisiensi Pemerintah Kota sebesar 94,20%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten sebesar 95,59%. Hal ini berarti bahwa pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur dapat menghasilkan output dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Timur.
4. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Rutin, kinerja Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah

Kabupaten, yang ditunjukkan oleh rata-rata rasio Aktivitas Belanja Rutin Pemerintah Kota sebesar 79,55%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio Aktivitas Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten sebesar 82,33%. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja rutin Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih rendah daripada alokasi belanja rutin Pemerintah Kabupaten sehingga dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur untuk belanja pembangunan (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih besar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Aktivitas Belanja Rutin yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.

5. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan, kinerja Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten, yang ditunjukkan oleh rata-rata rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Pemerintah Kota sebesar 19,84%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten sebesar 16,36%. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi daripada alokasi belanja pembangunan pada Pemerintah Kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat Aktivitas Belanja Pembangunan yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.
6. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kinerja Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten, yang ditunjukkan oleh rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota sebesar minus 4,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten sebesar minus 10,26%. Walaupun Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 memiliki Rasio Pertumbuhan PAD negatif, yang berarti bahwa realisasi PAD pada tahun penelitian lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun penurunan realisasi PAD pada Pemerintah Kota lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya pada komponen PAD dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel sebagaimana dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Pertumbuhan PAD yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.
7. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan, kinerja Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah

Kabupaten, yang ditunjukkan oleh rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota sebesar 7,08%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten sebesar 5,47%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya pada komponen Pendapatan dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Pertumbuhan Pendapatan yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.

8. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, kinerja Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kota, yang ditunjukkan oleh rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Pemerintah Kota sebesar 8,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten sebesar 3,68%. Hal ini berarti bahwa persentase peningkatan realisasi belanja rutin Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi daripada peningkatan realisasi belanja rutin Pemerintah Kabupaten sehingga persentase dana yang digunakan oleh Pemerintah Kota dalam merealisasikan belanja pembangunan relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat Pertumbuhan Belanja Rutin yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.
9. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, kinerja Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kota, yang ditunjukkan oleh rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten sebesar minus 7,48%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Kota sebesar minus 12,73%. Walaupun Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 memiliki Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan negatif, yang berarti bahwa realisasi Belanja Pembangunan pada tahun penelitian lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun penurunan realisasi Belanja Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Kota. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya pada komponen Belanja Pembangunan dibandingkan dengan Pemerintah Kota. Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Pertumbuhan Belanja Pembangunan yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Deskripsi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kota Surabaya dengan Rasio Kemandirian Keuangan 57,98%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Rasio Kemandirian Keuangan 8,22%.
 - b. Berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 135,91%, dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 83,97%.
 - c. Berdasarkan Rasio Efisiensi, Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Rasio Efisiensi 63,96%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Kabupaten Ngawi dengan Rasio Efisiensi 106,99%.
 - d. Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Rutin, Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kota Surabaya dengan Rasio Aktivitas Belanja Rutin 70,12%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Kabupaten Jombang dengan Rasio Aktivitas Belanja Rutin 89,48%.
 - e. Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kota Surabaya dengan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan 29,65%, dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Kota Kediri dengan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan 10,30%.
 - f. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 15,72%, dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Kabupaten Bangkalan dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah minus 38,79%.
 - g. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan 59,51% dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Kabupaten Bangkalan dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan minus 7,03%.
 - h. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin minus 6,96%, dan

- Pemerintah Kabupaten / Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Pemerintah Kota Batu dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin 14,33%.
- i. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memiliki kinerja tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 43,40%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja terendah adalah Pemerintah Kota Kediri dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan minus 45,22%.
2. Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Kota di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
 - b. Berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Kota. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Berdasarkan Rasio Efisiensi, Kinerja Pemerintah Kota di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Efisiensi.
 - d. Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Rutin, Kinerja Pemerintah Kota di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Rutin.
 - e. Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan, Kinerja Pemerintah Kota di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan.
 - f. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Pemerintah Kota di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
 - g. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Kinerja Pemerintah Kota di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang

- signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan.
- h. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, Kinerja Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Kota. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin.
 - i. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, Kinerja Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Kota. Hasil uji Kolmogorov Smirnov Dua Sampel menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan.

Saran

1. Berkenaan dengan deskripsi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan, saran terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 16,52% yang berarti bahwa kemampuan keuangannya rendah sekali. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur perlu lebih mengenal potensi daerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, rata-rata Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 109,77% yang berarti sangat efektif. Namun, rata-rata pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotadi Jawa Timur membuat target PAD 15,98% lebih rendah daripada realisasi penerimaan PAD 2017. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotadi Jawa Timur perlu membuat target PAD yang benar-benar mencerminkan potensi riil daerahnya.
 - c. Berdasarkan Rasio Efisiensi, rata-rata Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 95,27% yang berarti kurang efisien. Dalam merealisasikan target pendapatannya, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotadi Jawa Timur harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target pendapatan tersebut agar kenaikan biaya untuk merealisasikan pendapatan tidak melebihi pendapatan yang dapat direalisasikan.
 - d. Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Rutin, rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 81,67%. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur perlu menurunkan alokasi belanja rutin agar lebih banyak porsi alokasi belanja untuk membiayai pembangunan.
 - e. Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan, rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 17,18%. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa

- Timur perlu meningkatkan alokasi belanja pembangunan agar lebih banyak alokasi belanja yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.
- f. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah minus 8,87%. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar pertumbuhan dan realisasi PAD dapat tercapai.
 - g. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan, rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 5,85%. Meskipun memiliki rasio pertumbuhan pendapatan positif, namun pertumbuhan pendapatan tersebut lebih banyak berasal dari dana eksternal. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber dana eksternal.
 - h. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah 4,86%. Tingginya penggunaan anggaran untuk membiayai belanja rutin dan makin meningkatnya penggunaan anggaran untuk membiayai belanja rutin pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur perlu dikurangi agar alokasi alokasi belanja untuk membiayai pembangunan dapat ditingkatkan.
 - i. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur adalah minus 8,72%. Rendahnya alokasi anggaran untuk membiayai belanja pembangunan dan semakin menurunnya penggunaan anggaran untuk membiayai belanja pembangunan agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera meningkatkan alokasi belanja untuk membiayai pembangunan guna menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.
2. Berkenaan dengan Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Keuangan, saran terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten agar memperbaiki pengelolaan keuangannya terutama terkait dengan Kemandirian Keuangan Daerah, Efisiensi, Aktivitas Belanja Rutin, Aktivitas Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Pendapatan agar *gap* kinerja keuangan dengan Pemerintah kota tidak makin tinggi.
 - b. Pemerintah Kota agar memperbaiki pengelolaan keuangannya terutama terkait dengan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Rutin dan Pertumbuhan Belanja Pembangunan agar *gap* kinerja keuangan dengan Pemerintah Kabupaten tidak makin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2019. Determinan Kinerja Anggaran Belanja Pendidikan Pada Kabupaten / Kota di Aceh. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 19 No. 2 September 2019. hlm.149-166. Universitas Syiah Kuala.
- Adnyani, Ni Putu Novianti Wira dan Ni Luh Putu Wiagustini. 2018. Studi Komparatif: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sarbagita dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. *E-JurnalManajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018. hal.1111-1141. Universitas Udayana.
- Fahmi, Irham. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Edisi Keempat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* : Salemba Empat.
- Kusmila, Zesmi, Mukhzarudfa, Yudi. 2018. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2018. hal. 27-39. Universitas Jambi.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM.
- Munawir, S. 2016. *Analisa Laporan keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Nurabiah, 2018. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi* Vol. 3, No. 1, Oktober 2018.hal 67-100. Universitas Mataram.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi kedua. Bandung: Alfabet.